

**ANALISIS AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA
3 DESA DI KECAMATAN BETUNG
(Studi pada Desa Talang Jaya Mulya, Talang Jaya Indah, Rimba Asam)**

SKRIPSI



**Nama : Muhammad Ikhsan
NIM : 222013076**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**ANALISIS AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA
3 DESA DI KECAMATAN BETUNG
(Studi pada Desa Talang Jaya Mulya, Talang Jaya Indah, Rimba Asam)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana**



**Nama : Muhammad Ikhsan
NIM : 222013076**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

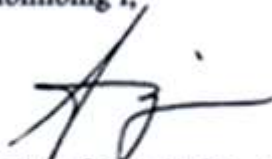
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHANSKRIPSI

Judul : Analisa Akuntabilitas Pemerintahan desa Dalam
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada 3 Desa di
Kecamatan Betung (Studi pada Desa Talang Jaya Mulya,
Desa Talang Jaya Indah, Desa Rimba Asam)
Nama : Muhammad Ikhsan
NIM : 222013076
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Januari 2019

Pembimbing I,



Rosalina Ghazali, SE., Ak., M.Si
NIDN/NBM :022815802/1021961

Pembimbing II,



Wellv, SE., M.Si
NIDN/NBM :0212128102/1085022

Mengetahui,
Dekan

u.b.Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, SE., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM :0216106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ikhsan

NIM : 222013076

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada yang merupakan menjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari telah terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Febuari2019

Penulis



Muhammad Ikhsan

ABSTRAK

Muhammad Ikhsan / 222013076 / 2019 / Analisis Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada 3 Desa di Kecamatan Betung (Study pada Desa Talang Jaya Mulya, Desa Talang Jaya Indah, Desa Rimba Asam)

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa pada desa Talang Mulya, Talang Jaya Indah, Rimba Asam. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dan desa pada Desa Talang Jaya Mulya, Talang Jaya Indah, Rimba Asam.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu untuk menganalisis akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa pada desa Talang Jaya Mulya, Talang Jaya Indah, Desa Rimba Asam.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Talang Jaya Mulya, Talang Jaya Indah, Rimba Asam adalah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik dan harus lebih memahami peraturan tentang pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No.113 Tahun 2014.

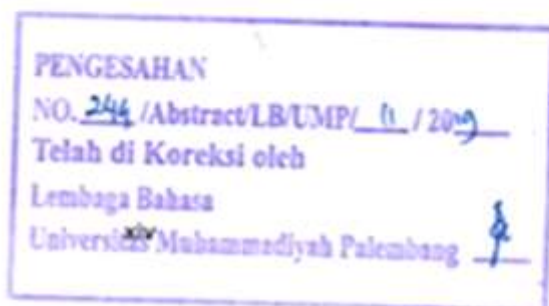
Kata Kunci : Akuntabilitas , Alokasi Dana Desa.

Abstract

Muhammad Ikhsan/222013076/2019/An Accountability Analysis of Village Government in Managing Village Fund Allocation in 3 Villages in Kecamatan Betung (Study in Talang Jaya Mulya Village, Talang Jaya Indah Village, Rimba Asam Village).

The formulation of the problem in this research was to know how the accountability analysis of village government in managing village fund allocation in Talang Mulya village, Talang Jaya Indah, Rimba Asam. The purpose of this study was to determine the accountability of village governments in managing allocations and villages in Talang Jaya Mulya Village, Talang Jaya Indah, Rimba Asam. This research included qualitative research, which was to analyze the accountability of village governments in managing village fund allocation in Talang Jaya Mulya village, Talang Jaya Indah, Rimba Asam Village. Data collection techniques used interviews. The results of the study which showed that the accountability of the management of village fund allocation in Talang Jaya Mulya Village, Talang Jaya Indah, Rimba Asam was to carry out good financial management and had to better understand the regulations regarding village financial management in accordance with Domestic Regulation No.113 in 2014.

Keywords: Accountability, Village Fund Allocation.



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang melimpah, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang motivator, junjungan umat islam, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. sehingga penyusunan skripsi yang berjudul Analisis Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada 3 Desa Kecamatan Betung (Studi pada Desa Talang Jaya Mulya, Desa Talang Jaya Indah, Desa Rimba Asam).

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahku M. Teguh dan Ibuku Yusna Harnila, kakak laki-lakiku Muhajirin dan kakak Perempuanku Dwi Lia serta seluruh keluarga besar serta saudara seperjuanganku yang dipertemukan karena Allah, yang selalu mendo'akan, memberikan motivasi dan inspirasi serta dukungan agar selalu menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pemimbingku Ibu Rosalina Ghazali, S.E.,M.Si.Ak dan Ibu Welly, S.E.,M.Si yang telah sabar membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran yang tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan penelitian menjadi lebih baik lagi. Selain itu, disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis

dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Betri, SE.,M.Si.,AK.,CA dan Bapak Mizan, SE.,M.Si.,AK.,CA selaku ketua Program dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak H.M.Basyaruddin R, S.E.,M.Si.,Ak.,CA, selaku Pembimbing Akademik paket 12 Angkatan 2013
5. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak/Ibu Pemerintah Desa di Kecamatan Betung.
7. Sahabat-sahabat paket 12
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian ini, atas perhatian dan masukan saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang, Febuari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN/COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Landasan Teori.....	14
1. Akuntabilitas.....	14
2. Pengertian Pemerintahan Desa.....	17

3. Pengertian Dana Desa	18
4. Pendapatan dan Belanja Desa.....	22
5. Pengertian alokasi dana desa	25
B. Penelitian Sebelumnya	32
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Operasionalisasi Variabel.....	35
D. Data Yang Digunakan	36
E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Analisis Data Dan Teknis Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Hasil Penelitian	39
1. Gambaran Umum Desa Talang Jaya Mulya.....	39
2. Gambaran Umum Desa Talang Jaya Indah	45
3. Gambaran Umum Desa Rimba Asam	54
B. Pembahasan Hasil Penelitian	62
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Data Alokasi Dana Desa	10
Tabel II.1 Penelitian Sebelumnya	35
Tabel III.I Operasional Variabel	38
Tabel IV.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talang Jaya Mulya.....	45
Tabel IV.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talang Jaya Indah.....	52
Tabel IV.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talang Rimba Asam	61
Tabel.IV.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talang Jaya Mulya.....	68
Tabel IV.5 Buku Kas Umum Desa Talang Jaya Mulya.....	69
Tabel IV.6 Buku Bank Desa Talang Jaya Mulya.....	69
Tabel IV.7 Buku Pembantu Pajak Desa Talang Jaya Mulya	69
Tabel IV.8 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan	71
Tabel IV.9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talang Jaya Indah.....	72
Tabel IV.10 Buku Kas Umum Desa Talang Jaya Indah	73
Tabel IV.11 Buku Bank Desa Talang Jaya Indah	73
Tabel IV.12 Buku Pembantu Pajak Desa Talang Jaya Indah.....	74
Tabel IV.13 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan	76
Tabel IV.14 Anggaran Pendapatan dsn Belanja Desa Rimba Asam	77
Tabel IV.15 Buku Kas Umum Desa Rimba Asam	78
Tabel IV.16 Buku Bank Desa Rimba Asam	78
Tabel IV.17 Buku Pembantu Pajak Desa Rimba Asam.....	79

Tabel IV.18 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan	80
Tabel IV.19 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan.....	82
Tabel IV.20 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan	84
Tabel IV.21 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan.....	86
Tabel IV.22 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban	88
Tabel IV.23 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban	89
Tabel IV.24 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Desa Talang Jaya Mulya.....	44
Gambar IV.2 Struktur Organisasi Desa Talang Jaya Indah	51
Gambar IV.3 Struktur Organisasi Desa Rimba Asam	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman, karena adanya tuntutan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggung-jawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga di tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi

pemerintahan secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang

dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pendanaan dari setiap kegiatan pembangunan desa, memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus. Besarnya bagi hasil pajak daerah sebagaimana yang dimaksud yang diperuntukkan bagi desa paling sedikit adalah 10% dari penerimaan pajak daerah per tahun, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa yang bersangkutan. Untuk besarnya bagi hasil retribusi daerah yang diperuntukkan bagi desa adalah paling sedikit 10% dari penerimaan retribusi daerah per tahun dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan pelayanan. Sedangkan untuk besarnya bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa adalah sebesar 5% sampai dengan 10% dari penerimaan dana perimbangan per tahun, yang terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, serta Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.

ADD yang diberikan tersebut pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabel, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi menjadi agenda yang sangat penting. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui ADD pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan Alokasi Dana Desa rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Hal ini dilakukan karena sebesar 70% dari Alokasi Dana Desa di peruntukkan bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa. ADD yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta pemukiman, honor Tim Pelaksana ADD dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting. Sedangkan penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan ADD, semua lapisan mulai dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam

menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrebangdes). Musrebangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan ditingkat desa berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa bersangkutan.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh sukasmanto sumpeno (2011) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk

mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dalam masalah pembangunan dan pemerintah desa. Pertanggung jawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDesa dengan dana desa sebagai komponen didalamnya. Jika laporan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintah desa akan meningkat sedangkan kenyataan saat ini kterkait laporan keuangan desa, secara prinsip masih banyak desa yang memiliki permasalahan terkait laporan keuangan desa, antara lain: (1) sering terjadi keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari desa ke kecamatan, (2) masalah lemahnya *skill*(keterampilan) terkait kreativitas laporan keuangan, (3) masih lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi (internet), (4) adanya keterlambatan dan kesulitan pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan keuangan desa.

PROFIL DESA

✓ Keterangan Umum

- Batas wilayah:
 - Sebelah Utara : Kecamatan Pulau Rimau.
 - Sebelah Timur : Kecamatan Suak Tapeh dan Kec. Banyuasin III.
 - Sebelah Selatan : Kecamatan Rantau Bayur.
 - Sebelah Barat : Kabupaten Musi Banyuasin.

No	Desa/Kelurahan	Utara	Timur	Selatan	Barat
1	Betung	Desa Sri Kembang	Kelurahan Rimba Asam	Desa Suka Mulya, Kab. Muba	Desa Bukit, Taja Mulya
2	Rimba Asam	Desa Sri Kembang	Desa Lubuk Karet	Desa Taja Raya II	Kelurahan Betung
3	Suka Mulya	Desa Bukit	Kelurahan Betung	Kab. Muba	Kab. Muba
4	Bukit	Desa Sri Kembang	Kelurahan Betung	Desa Suka Mulya	Kab. Muba
5	Sri Kembang	Kec. Pulau Rimau	Desa Lubuk Karet	Desa Bukit, Kel. Betung, Kel. Rimba Asam	Kab. Muba

6	Lubuk Karet	Kec. Pulau Rimau	Kec. Suak Tapeh	Desa Taja Raya II, Desa Pulau Rajak	Kel. Rimba Asam
7	Pulau Rajak	Desa Lubuk Karet	Kec. Suak Tapeh	Kec. Banyuasin III	Desa Taja Raya II
8	Taja Raya I	Desa Taja Raya II	Kec. Banyuasin III	Desa Taja Mulya	Kab. Muba
9	Taja Raya II	Kel. Betung, Desa Lubuk Karet	Desa Pulau Rajak	Desa Taja Raya I	Kel. Betung
10	Taja Mulya	Desa Taja Raya I	Kec. Banyuasin III	Kec. Rantau Bayur	Desa Taja Indah
11	Taja Indah	Kab. Muba	Desa Taja Mulya	Kec. Rantau Bayur	Kab. Muba

- Tinggi pusat pemerintahan dari permukaan laut : 5 s.d. 25 meter.
- Jarak pusat pemerintahan dari:
 - Desa/kelurahan : 17 Km.
 - Ibukota kabupaten : 22 Km.
 - Ibukota provinsi : 66 Km.

No	Desa/Kelurahan	Jarak pusat pemerintahan dari		
		Ibukota Kecamatan (km)	Ibukota Kabupaten (km)	Ibukota Provinsi (km)
1	Rimba Asam	0,5	22	66
2	Taja Mulya	7	29	73
3	Taja Indah	17	39	83

✓ Luas Wilayah

No	Desa/Kelurahan	Luas wilayah (ha)	Luas wilayah (km)
1	Rimba Asam	4.336	43,36
2	Taja Mulya*)	2.628	26,28
3	Taja Indah*)	3.196	31,96

Sumber data : Luas pada peta desa/kelurahan yang telah disahkan oleh Bupati.

✓ Prasarana pemerintah desa/kelurahan:

No	Desa/Kelurahan	Gedung Kantor (ada/tidak)	Balai Desa/Kelurahan (ada/tidak)	Tanah Kas Desa (ha)
1	Rimba Asam	Tidak	Tidak	0
2	Taja Mulya	Ada	Ada	0
3	Taja Indah	Ada	Ada	0

✓ Sarana Perekonomian

No	Desa/Kelurahan	Koperasi	Pasar	Pasar Mingguan (kalangan)	Toko/kios/warung
1	Rimba Asam	0	1	0	0
2	Taja Mulya	0	0	1	0
3	Taja Indah	1	0	1	0

- Bank
 - BRI
 - Bank Sumsel Babel
 - BNI 1946
 - Bank Danamon
 - BTPN
 - Bank Mandiri
 - BNI Syariah
 - Bank Pundi
 - Bank Mega Syariah
 - Bank Muamalat

✓ Pendidikan

No	Desa/Kelurahan	PAUD	TK	SD	SLTP	SLTA	SLB
1	Rimba Asam	2	3	4	2	3	1
2	Taja Mulya	1	0	3	1	0	0
3	Taja Indah	0	0	3	1	0	0

✓ Rumah Penduduk

- Dinding terbuat dari batu : 6065 bh.
- Dinding terbuat dari sebagian batu : 1263 bh.
- Dinding terbuat dari kayu/papan : 2213 bh.
- Dinding terbuat dari bambu/lainnya : 75 bh.
- Rumah panggung : 671 bh.
- Rumah Tidak Layak Huni : 1018 bh.

No	Desa/ Kelurahan	Dinding batu	Dinding sebagian batu	Dinding kayu/papan	Dinding bambu	Rumah panggung	Rumah tidak layak huni	Jumlah rumah
1	Rimba Asam	1518	127	191	5	84	124	1925
2	Taja Mulya	303	147	472	40	80	19	1061
3	Taja Indah	307	126	406	4	192	314	1035

No	Desa / Kelurahan	KK	Laki-laki	Perempuan	Lk+Pr
1.	Rimba Asam	2.802	5.689	5.433	11.122
2.	Taja Mulya	1.627	3.120	3.162	6.282
3.	Taja Indah	1.678	3.517	3.422	6.939

No	Desa/ Kelurahan	Islam	Kristen	Khatolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Rimba Asam	10.980	128	13	0	1	0
2	Taja Mulya	6.282	0	0	0	0	0
3	Taja Indah	6.939	0	0	0	0	0

No	Desa/ Kelurahan	Belum/ tidak bekerja	Mengu- rus rumah tangga	Pelajar/m aha-siswa	PNS	TNI	Polri
1	Rimba Asam	3.514	2.051	1.948	164	7	17
2	Taja Mulya	1.637	620	1.217	5	2	0
3	Taja Indah	2.124	1.146	1.278	13	1	0

No	Desa/ Kelurahan	Pedagang	Petani	Karya- wan	Buruh harian lepas	Wira- swasta	Lainnya
1	Rimba Asam	668	1.096	411	305	522	419
2	Taja Mulya	78	2.201	63	19	58	382
3	Taja Indah	51	1.929	36	13	117	231

No	Desa/ Kelurahan	0-4	4-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
1	Rimba Asam	799	1.031	1.106	1.016	1180	1257	1047	806
2	Taja Mulya	434	600	671	562	676	746	653	523
3	Taja Indah	507	738	758	664	739	737	657	564

No	Desa/ Kelurahan	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	64-69	70-74	>75
1	Rimba Asam	729	625	565	345	227	137	104	139
2	Taja Mulya	370	331	246	151	112	69	67	71
3	Taja Indah	412	350	242	164	136	103	83	85

✓ **Kepadatan Penduduk**

No	Desa/Kelurahan		Km ² /jiwa
1	Rimba Asam	:	252
2	Taja Mulya	:	239
3	Taja Indah	:	217

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti ingin mengetahui akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Talang Jaya Mulya, Desa Talang Jaya Indah, dan Desa Rimba Asam pada Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Alasan peneliti memilih ketiga desa tersebut tertuang dalam Tabel 1.1 berikut:

Tabel I.1
Alokasi Dana Desa di Kecamatan Betung
Kabupaten Banyuasin

No.	Desa	ADD Tahun 2017	Realisasi
1	Desa Talang Jaya Mulya	375.544.000	225.326.400
2	Desa Talang Jaya Indah	410.787.000	246.472.200
3	Desa Rimba Asam	457.000.000	274.200.000
	Jumlah	1.243.331.000	

Sumber: Badan Kepegawaian Kecamatan Betung, data diolah

Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga, perlu pula dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian, sehingga peneliti memilih Desa Talang Jaya Mulya, Desa Talang Jaya Indah, dan Desa Rimba Asam yang mendapat ADD tertinggi di Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti tentang akuntabilitas pada ketiga desa yaitu Desa Talang Jaya Mulya, Desa Talang Jaya Indah, dan Desa Rimba Asam, tahap pertanggungjawaban telah dilaporkan oleh masing-masing kepala desa kepada bupati sesuai laporan pertanggungjawaban tahun 2017 dan sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan mencantumkan laporan kekayaan milik desa, laporan program sektoral dan program daerah yang masuk desa, serta laporan penggunaan dana desa tahun anggaran, namun dikarenakan laporan pertanggungjawaban untuk tahun 2017 masih ada kegiatan pembangunan yang belum selesai atau masih dalam proses pembangunan.

Masalah lainnya akuntabilitas (Pertanggungjawaban) yang dibuat dalam bentuk laporan keuangan sampai saat ini juga belum ditunjang dengan sistem dan prosedur yang memadai. di Desa Talang Jaya Mulya, Talang Jaya Indah, Rimba Asam belum menerapkan dan membuat semua laporan yang menjadi peraturan dalam penyusunan laporan keuangan desa. Dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa.

Desa Talang Jaya Mulya, Talang Jaya Indah, Rimba Asam belum merasakan adanya perubahan pembanguana di Desa. Tingkat pembangunan didesa juga masih belum banyak yang berjalan seperti pembangunan jalan setapak masih banyaknya jalan yang rusak dan belum diperbaiki, adanya anggaran yang dikeluarkan mengenai pembuatan atau pembangunan taman, pelatihan kelompok petani dan pengadaan hewan ternak.

Dengan adanya penelitian diatas peneliti berusaha menguji tingkat akuntabilitas Pemerintah Desa dalam mengelola kinerja keuangan, dengan objek penelitian yang berbeda yaitu Pemerintah Desa yang ada di wilayah Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin yang menggunakan laporan pertanggungjawaban ADD tahun 2018. Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada 3 Desa Kecamatan Betung (Studi pada Desa Talang Jaya Mulya, Desa Talang Jaya Indah, Desa Rimba Asam).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pemerintah desa, pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Talang Jaya Mulya, Desa Talang Jaya Indah, Desa Rimba Asam Kecamatan Betung

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Akuntabilitas, Pemerintah Desa, Alokasi Dana Desa Pada Desa Talang Jaya Mulya, Desa Talang Jaya Indah, Desa Rimba Asam Kecamatan Betung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik, yaitu mengenai pentingnya prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Talang Jaya Mulya, Desa Talang Jaya Indah, Desa Rimba Asam Kecamatan Betung.

2. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penyebab salah satu bahan masukan dan bahan pemikiran Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Talang Jaya Mulya, Talang Jaya Indah, dan Desa Rimba Asam.

3. Bagi Almamater

Diharapkan dapat menjadi referensi bahan kajian mahasiswa lain dan menjadi pertimbangan penting bagi penelitian pada masa yang akan data

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Irma. 2015. *Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi)*. (<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/4254/3169>)
- Risti Valentina Huri, 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan (Studi pada Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi)*
- Putu Andi Suarjana Putra, 2017. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa*.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Nasirah. 2016. “*Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau)*”, Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Wahyu Nur Aini. 2015. *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2014*. Jurnal Akuntansi. (Online). (<http://eprints.umm.ac.id/20680/1/10a.pdf>. diakses 17 April 2018).
- Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 72. 2005. *tentang Sumber Kedudukan Keuangan Desa*
- Permendagri Nomor 37. 2007. *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*
- Permendagri Nomor 113. 2014. *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Ulum, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMMPRESS
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa